



## **TESIS**

### **Judul:**

Doktrin Business Judgement Rule Dalam Memberikan  
Perlindungan Hukum Direksi BUMN (Studi Kasus  
Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 121/K/PID.SUS/2020)

### **Disusun oleh:**

**BERRY GUNAWAN**  
NIM. 207211017

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
2024

Doktrin Business Judgement Rule Dalam Memberikan  
Perlindungan Hukum Direksi BUMN  
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 121/K/PID.SUS/2020)

**TESIS**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memeperoleh Gelar  
Magister Hukum Di Universitas Tarumanagara

Disusun Oleh:

Nama : Berry Gunawan  
NIM : 207211017  
Program : Magister Hukum

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVESITAS TARUMANAGARA**

**2024**

## Pengesahan

Nama : BERRY GUNAWAN  
NIM : 207211017  
Program Studi : MAGISTER HUKUM  
Judul Tesis : Doktrin Business Judgement Rule Dalam Memberikan  
Perlindungan Hukum Direksi BUMN (Studi Kasus Putusan  
Mahkamah Agung RI Nomor 121/K/PID.SUS/2020)  
Title : The Doctrine of Business Judgement Rule in Providing  
Legal Protection for Directors of State-Owned Enterprises  
(Case Study of the Indonesia Supreme Court Decision  
Number 121/K/PID.SUS/2020)

Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi MAGISTER HUKUM Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 19-Januari-2024.

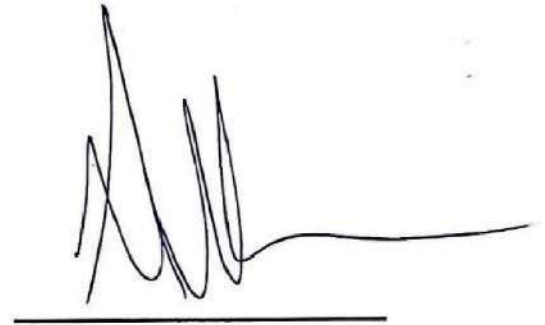
### Tim Penguji:

1. AMAD SUDIRO, S.H., M.H., M.M., Dr., MKn., Prof
2. ARIAWAN GUNADI, S.H., M.H., Dr. Prof.
3. RICHARD C.ADAM, S.H., LL.M., Dr.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

### Pembimbing:

ARIAWAN GUNADI, S.H., M.H., Dr. Prof.  
NIK/NIP: 10208001



Jakarta, 19-Januari-2024

Ketua Program Studi



JEANE NELTJE, S.H., M.H., APU., Dr., Prof.

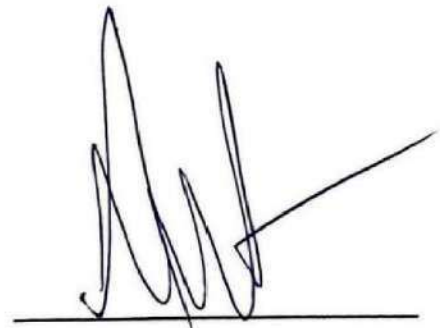
## Persetujuan

Nama : BERRY GUNAWAN  
NIM : 207211017  
Program Studi : MAGISTER HUKUM  
Judul : Doktrin Business Judgement Rule Dalam Memberikan  
Perlindungan Hukum Direksi BUMN (Studi Kasus Putusan  
Mahkamah Agung RI Nomor 121/K/PID.SUS/2020)

Tesis ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 12-Desember-2023

Pembimbing:  
ARIAWAN GUNADI, S.H., M.H., Dr. Prof.  
NIK/NIP: 10208001

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right, positioned above a solid horizontal line.

## ABSTRAK

- Judul Tesis : Doktrin Business Judgement Rule Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Direksi BUMN Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 121/K/PID.SUS/2020)
- Nama Mahasiswa : Berry Gunawan
- NIM : 207211017
- Kata Kunci : Business judgement rule, Perlindungan Hukum, Direksi, BUMN
- Isi Abstrak : Doktrin Business judgement rule menyatakan bahwa Dewan Direksi perseroan tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas risiko yang timbul akibat langkah-langkah yang mereka ambil, hal tersebut seperti kasus pada Putusan Nomor 121/K/PID.SUS/2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan terkait Doktrin Business judgement rule dalam memberikan perlindungan hukum bagi Direksi BUMN dan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap Direksi yang telah menggunakan Business judgement rule dalam mengelola Perseroan pada kasus Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 121/K/Pid.Sus/2020. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah penelitian normatif yuridis dengan pendekatan perundang-undangan dan empiris (kasus). Hasil penelitian menunjukkan antara lain 1) ketentuan yang mengatur terkait doktrin business judgement rule dalam memberikan perlindungan hukum bagi Direksi BUMN diatur dalam Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 97 UUP 40 Tahun 2007. Penerapan business judgement rule sebagai suatu doktrin telah diatur pada pasal 13 ayat (2) POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang direksi dan dewan komisaris Emiten atau perusahaan publik 2) Analisis perlindungan hukum terhadap direksi yang mengelola perusahaan dengan menggunakan business judgement rule pada keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 121/K/Pid.Sus/2020 yang menyatakan antara lain apabila dapat dibuktikan dan tidak memenuhi unsur Pasal 2 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 serta dengan adanya ketentuan business judgement rule dalam undang- undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sudah dapat melindungi dewan setiap keputusan bisnis yang diambilnya.
- Daftar Acuan :
- Pembimbing : Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H.

## ABSTRACT

- Title : The Doctrine of Business Judgement Rule in Providing Legal Protection Directors of State-Owned Enterprises (Case Study Decision of The Supreme Court of The Republic Indonesia Number 121/K/PID.SUS/2020)
- Name : Berry Gunawan
- NIM : 207211017
- Keyword : *Business judgement rule*, Legal Protection, Directors, BUMN
- Content : The Business judgment rule doctrine states that the company's Board of Directors cannot be held accountable for the risks arising from the steps they take, such as the case in Decision Number 121/K/PID.SUS/2020. This research aims to find out the arrangements related to the Business judgment rule doctrine in providing legal protection for the Directors of State-Owned Enterprises (BUMN) and to analyze the legal protection of Directors who have used the Business judgment rule in managing the Company in the case of the Indonesian Supreme Court Decision Number 121/K/Pid.Sus/2020. In this research, the method used is normative juridical research with a statutory and empirical (case) approach. The results of the study show, among others, 1) the provisions governing the business judgment rule doctrine in providing legal protection for the Directors of state-owned Enterprises (BUMN) are regulated in Law No.40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, as stated in Article 97 of Law 40 of 2007. The application of the business judgment rule as a doctrine has been regulated in article 13 paragraph (2) POJK Number 33 / PJOK.04 / 2014 concerning directors and board of commissioners of Issuers or public companies 2) Analysis of the legal protection of directors who manage the company using the business judgment rule in the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 121/K/Pid.Sus/2020 which states, among others, that if it can be proven and does not fulfill the elements of Article 2 of Law Number 31 of 1999 concerning the eradication of criminal acts of corruption which has been amended by Law Number 20 of 2001 and with the provisions of the Business Judgement Rule in Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, it can protect the board of every business decision it makes.
- References :
- Thesis Adviser : Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yesus Kristus karena atas berkat, kasih dan karuniaNya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir berupa tesis ini dengan baik. Adapun penulisan tesis ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Magister Hukum di Universitas Tarumanagara.

Judul tesis ini adalah *Doktrin Business Judgement Rule Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Direksi BUMN (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 121/K/PID.SUS/2020)*. Penulis mengharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi dalam keilmuan hukum dan masyarakat.

Pada kesempatan yang baik ini perkenankan penulis menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada:

1. Prof. Dr. H. Ahmad Sudiro, S.H., M.H., M.Kn. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk menempuh pendidikan pada Magister Ilmu Hukum.
2. Prof. Dr. Jeane N. Selly, S.H., M.H., A.P.U. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
3. Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah mengarahkan dan membina serta bantuan penulis sejak dari awal hingga penyelesaian tesis ini.
4. Para Dosen, Asistant Dosen dan Staf Pengajar Magister Ilmu Hukum yang telah memberikan pengetahuan dan wawasan serta keterampilan selama penulis menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
5. Chatrine Lee dari Sandi Lee Advocates yang telah banyak memberikan dukungan, masukan dan memperluas wawasan penulis
6. Istriku tercinta Maria Sinaga, anakku Jonathan dan Samuel yang telah memberikan dukungan doa, semangat dan motivasi kepada penulis.
7. Seluruh rekan sejawat Magister Ilmu Hukum Universitas Tarumanagara Angkatan 2021/2022 untuk bantuan dan dukungannya serta seluruh sahabat penulis yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa tesis ini masih belum sempurna dan membutuhkan saran dan masukan yang membangun sebagai perbaikan dan semoga penulisan tesis memberikan manfaat bagi institusi terkait dan Masyarakat.

Jakarta, Desember 2023

Penulis

Berry Gunawan

## **Pernyataan**

Nama : BERRY GUNAWAN  
NIM : 207211017  
Program Studi : MAGISTER HUKUM  
Judul : Doktrin Business Judgement Rule Dalam Memberikan  
Perlindungan Hukum Direksi BUMN (Studi Kasus Putusan  
Mahkamah Agung RI Nomor 121/K/PID.SUS/2020)

Dengan ini menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 12-Desember-2023  
Yang menyatakan



**BERRY GUNAWAN**  
NIM. 207211017



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGAJUAN .....	ii
PERSETUJUAN .....	iii
ABSTRAK .....	iv
ABSTRACT .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ORISINALITAS .....	vii
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR SINGKATAN .....	xi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
D. Kerangka Konseptual .....	9
1. Asas Kepastian Hukum .....	9
2. Teori Penegakan Hukum .....	10
3. Teori Kekakayaan Bertujuan Sebagai Teori Badan Hukum .....	13
4. Teori Perlindungan Hukum .....	14
5. Teori Fiksi .....	16
6. Teori Realistik .....	17
7. Teori Kontrak .....	17
8. Teori Fiduciary .....	18
9. Teori Business Judgement Rule .....	19
E. Metode Penelitian .....	21
1. Jenis Penelitian .....	21

2. Pendekatan Penelitian .....	22
3. Jenis Bahan Hukum .....	22
4. Jenis Analisis Bahan Hukum .....	23
F. Sistematika Penulisan .....	25
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	26
A. Landasan Teori .....	26
1. Teori Kekayaan Bertujuan Sebagai Teori Badan Hukum .....	26
2. Teori Perlindungan Hukum .....	28
3. Teori Personalitas Perseroan .....	30
B. Pembahasan Penelitian yang Relevan .....	32
C. Kerangka Konseptual .....	36
1. Tinjauan Umum Business Judgement Rule .....	36
2. Tinjauan Umum Badan Usaha Milik Negara .....	47
3. Tinjauan Umum tentang Direksi .....	54
4. Tinjauan Umum Perseroan Terbatas .....	64
BAB III HASIL PENELITIAN .....	80
A. Gambaran Umum Tentang Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 121/K/PIS.SUS/2020 .....	80
1. Kasus Posisi .....	80
2. Pertimbangan Hakim .....	84
3. Amar Putusan .....	88
B. Hasil Wawancara dengan Advokat Chatrine Lee dari Kantor Hukum Sandi Lee Adcicates .....	89
BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN .....	98
A. Pengaturan Doktrin Business Judgement Rule dalam Memberikan Perlindungan Hukum Direksi BUMN .....	98
B. Analisis Perlindungan Hukum terhadap Direksi yang telah Menggunakan Business Judgement Rule dalam Mengelola Perseroan pada Kasus Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 121/K/Pid.Sus/2020 .....	127

BAB V PENUTUP .....	150
A. Kesimpulan .....	150
B. Saran .....	151
DAFTAR PUSTAKA .....	153
LAMPIRAN .....	160

## DAFTAR SINGKATAN

PIDSUS	: Pidana Khusus
POJK	: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
BUMD	: Badan Usaha Milik Daerah
CEO	: Chief Executive Officer
BMG	: Basker Manta Gummy
PI	: Participating Interest
SPA	: Sales Purchasing Agreement
ROC	: Roc Oil Company
BJR	: Business Judgement Rule
HAM	: Hak Asasi Manusia
UUPT	: Undang Undang Perseroan Terbatas
OIP	: Operator Investasi Pemerintah
KIP	: Komite Investasi Pemerintah
RUPS	: Rapat Umum Pemegang Saham
Fa	: Firma
CV	: Commanditaire Venootschap
KUHPer	: Kitab Undang Undang Hukum Perdata
KUHD	: Kitab Undang Undang Hukum Dagang
PHE	: Pertamina Hulu Energy
MBCA	: Model Business Corporation Act
BOPD	: Barrel of Oil per Day
TP3UH	: Tim Pengembangan dan Pengelolaan Portfolio Usaha Hulu

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran 2 : Surat Tugas Penunjukan Dosen Pembimbing
- Lampiran 3 : Rekap Bimbingan Skripsi
- Lampiran 4 : Surat Keterangan Turnitin dan Hasilnya
- Lampiran 5 : Letter of Acceptance Jurnal
- Lampiran 6 : Bukti Wawancara
- Lampiran 7 : Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 121/K/PID.SUS/2020